

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan September 2021, Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,14% (mtm). Tekanan inflasi di Provinsi NTB tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm) serta lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi NTB historis selama 3 tahun (2018 - 2020) yang secara rata-rata sebesar -0,40% (mtm).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi pada bulan September 2021 terutama bersumber dari kelompok inflasi inti (core inflation/CI) mengalami inflasi sebesar 0,22% (mtm), disebabkan oleh peningkatan biaya sewa rumah. Selain itu, kelompok Administered Price (AP) juga mencatatkan inflasi, yaitu sebesar 0,34% (mtm) sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara dan rokok kretek filter yang masih terus mengalami penyesuaian harga setelah kenaikan cukai di awal tahun. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok Volatile Food (VF) yang tercatat mengalami deflasi 0,48% (mtm) sejalan dengan ketersediaan pasokan selama musim panen. Secara spasial, pada bulan September 2021, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm) dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,15% (mtm).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

(i) Penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi NTB yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi NTB untuk membahas tantangan dan strategi tindak lanjut pengendalian inflasi serta koordinasi ketersediaan bahan pokok menjelang World Superbike (WSBK); (ii) Koordinasi penguatan data neraca pangan di masing-masing kabupaten/kota; (iii) Inisiasi/penjajakan MoU sebagai payung hukum kerjasama ketahanan pangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTB bersama TPID se-Provinsi NTB;

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengadaan rapat TPID yang lebih berkala

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengadaan rapat TPID yang lebih berkala